

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis data dari penelitian yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi sosial merupakan program CSR dari Coca-Cola Foundation yang dilanjutkan oleh Perpustakaan Nasional RI. Program ini menjadi program prioritas nasional yang didistribusikan kepada perpustakaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kelurahan. Perencanaan program didorong oleh faktor internal, eksternal dan kebutuhan masyarakat terhadap fungsi sosial perpustakaan. Dalam perencanaan ini, perpustakaan juga melibatkan lembaga, instansi pemerintah dan *stakeholders*. Bidang yang ditunjuk adalah bidang layanan otomasi dan kerja sama
2. Tujuan dari program TPBIS adalah untuk mempromosikan perpustakaan kepada masyarakat umum melalui keterlibatan *stakeholders* sehingga masyarakat akan tertarik ke perpustakaan dan akan memberikan dampak kepada peningkatan wawasan, peningkatan literasi, dan peningkatan penghasilan. Pengadaan kelas-kelas keterampilan dilakukan karena adanya upaya untuk menjangkau peserta yang lebih luas, mengembalikan eksistensi perpustakaan dan memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia.

3. Terdapat beberapa regulasi yang menjadi dasari program TPBIS, di antaranya: Pertama, Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023. Kedua, Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018. Ketiga, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perpustakaan pada Bab 8 terdapat aturan mengenai Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi sosial.

4.2 Saran

Dari uraian hasil temuan di atas, terdapat beberapa saran yang akan diajukan kepada berbagai pihak sebagai evaluasi dari kebijakan yang sedang berjalan sehingga diharapkan pelaksanaan program menjadi lebih baik, berikut uraiannya:

1. Bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat agar dapat meningkatkan program dengan memperluas jangkauan program, mengutamakan kegiatan berbasis literasi, melakukan pengadaan anggaran untuk diberikan ke narasumber dan menyediakan alat dan bahan sebagai keperluan pelatihan.
2. Bagi Pemerintah Provinsi diperlukannya penguatan regulasi dan anggaran, dimana pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan yang mendukung penguatan fungsi perpustakaan dalam RPJMD serta mengalokasikan anggaran memadai untuk pengembangan infrastruktur, koleksi, dan SDM.
3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat melanjutkan penelitian ini dengan fokus pada studi komparatif antara provinsi dengan kab/kota untuk melihat variasi implementasi program TPBIS.